

# PERAN PERGURUAN TINGGI DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

H.M. Abdul Kholiq

Dosen UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo

(Kandidat Doktor Ilmu Politik UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta)

## Abstrak

Peran perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan bangsa Indonesia ini menuju bangsa yang maju dan beradab, yakni: *Pertama*, Perguruan Tinggi sebagai agen perubahan (*agent of change*); Perguruan tinggi sebagai satuan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi memiliki kedudukan penting dalam proses perubahan sosial karena perguruan tinggi mengemban fungsi sebagai *agent of social change* dalam melakukan transformasi kultural kearah kondisi masyarakat yang lebih maju. Dalam konteks ini, fungsi perguruan tinggi, yaitu; a) Sebagai penghasil tenaga kerja yang bermutu, b), sebagai lembaga pelatihan bagi karir peneliti, dan c), sebagai organisasi pengelola yang efisien. Perguruan tinggi di Indonesia menjalankan tiga fungsi tersebut dengan mempertimbangkan ciri khas nasional sesuai dengan latar belakang historis, sosio kultural dan idiologis. *Kedua*, Perguruan Tinggi sebagai pusat kebudayaan; Pendidikan sebagai prakarsa yang meliputi proses pengalihan pengetahuan dan keterampilan serentak dengan proses pengalihan nilai-nilai budaya. Proses itu sekaligus menjamin terpeliharanya jalinan antar generasi dalam suatu masyarakat.

Orientasi pada nilai-nilai budaya pada gilirannya menjelmakan perilaku manusia sebagai anggota masyarakat dengan peradabannya yang khas. Sejauh mana masyarakat itu berorientasi pada nilai-nilai budayanya, menentukan tangguh-rapuhnya ketahanan budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama terukur melalui apa yang terjadi dalam pelbagai pertemuan antar budaya. *Ketiga*; Perguruan Tinggi sebagai *Moral Force* Pemberantasan Korupsi. Keterlibatan civitas akademika dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum.

Peran aktif segenap civitas akademik pada perguruan tinggi diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif mahasiswa perlu dibekali dengan pendidikan anti korupsi dan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan upaya pemberantasan. Dan yang tidak kalah penting, untuk dapat berperan aktif mahasiswa harus dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari.

*Kata Kunci:* Perguruan Tinggi, Korupsi

## Abstract

The role of college in supporting develop indonesia leads to the nation developed and province for his first, college as agent of change; a collegiate as a unit of that are implementing higher education having the ascendancy in the process of social changes because college carry function as agent of social change in to transform cultural at conditions of the community more advanced. In this context, function universities, namely a ) as producer workers high-quality b ), as an institution training for career researchers and c ), in an manager efficient. Universities in indonesia run 3 functions the consider typical national in accordance with background historical, sosio

cultural and ideologies. Second, college as cultural center; education as the initiatives that covering the process diversion knowledge and skill.

Orientation in of cultural values in turn menjelmakan human behavior as a member of society with peradabannya being distinctive. The extent to which the community oriented to their culture, values determine tangguh-rapuhnya culture of society security related especially measurable through what was going on in all the meeting between culture. The third; college as moral force anti-corruption. The involvement of those akademika in the fight against corruption of course not on efforts to enforcement which is the authority of law enforcement institutions.

An active role in all academics academic college is expected to be more focused on prevention corruption by joining build culture anti corruption in the community. Students expected to act as agent of change and engine of the anti corruption in the community. To be actively involved with students need to education anti corruption and knowledge quite about the details of corruption and to combat. And no less important, to be actively student must understand and applying nilai-nilai anti corruption in the life of sehari-hari.

Keywords: college, corruption

## A. Latar Belakang

Substansi pendidikan adalah berusaha membangun seseorang untuk lebih dewasa. Atau Pendidikan adalah suatu proses transformasi anak didik agar mencapai hal hal tertentu sebagai akibat proses pendidikan yang diikutinya. Sebaliknya pendidikan berarti menghasilkan atau mencipta walaupun tidak banyak. Pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu sebagai pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup.<sup>1</sup> Menurut Miramba, pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.<sup>2</sup>

Posisi sebagai sistem sosial, lembaga pendidikan harus memiliki fungsi dan peran dalam perubahan masyarakat menuju ke arah perbaikan dalam segala lini. Dalam hal ini lembaga pendidikan memiliki dua karakter secara umum. *Pertama*, melaksanakan peranan fungsi dan harapan untuk mencapai tujuan dari sebuah sitem. *Kedua* mengenali individu yang berbeda-beda dalam peserta didik yang memiliki kepribadian dan disposisi kebutuhan.<sup>3</sup>

Pertumbuhan dalam jumlah lembaga yang demikian pesat, serta perubahan ke sistem studi terencana yang lebih menekankan efisiensi

---

<sup>1</sup> Syaful Sagala. *Konsep dan Makna Pembelajaran*. Alfabeta (Bandung, Alfabeta, 2006). hlm. 1

<sup>2</sup> Miramba Ahmad. *Pengantar filsafat pendidikan Islam* ( Bandung, Al Ma'rif .1989), hlm. 19

<sup>3</sup> Hamalik Oemar, *.Perencanaan Pegajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem*. (Jakarta, Bumi Aksara, 2005), hlm. 23.

dalam penyelenggaraan pendidikan, telah menimbulkan situasi transisi yang dicirikan oleh perkembangan tanpa kesatuan pola dan kinerja yang kurang meyakinkan. Karena itu, pemerintah berhasrat untuk memperbaiki keadaan perguruan tinggi di Indonesia itu, yang seiring dengan pembangunan bangsa Indonesia melalui program-program pembangunan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Paling tidak ada tiga (3) peran yang dimainkan perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan bangsa Indonesia ini menuju bangsa yang maju dan beradab. Kedua peran tersebut adalah: (1), Perguruan Tinggi sebagai agen perubahan (*agent of change*); (2), Perguruan Tinggi sebagai pusat ilmu pengetahuan dan teknologi; (3), Perguruan Tinggi sebagai *Moral Force* Pemberantasan Korupsi.

## B. Kajian Literatur

### 1. Perguruan Tinggi Sebagai Agen Perubahan.

Prinsip perubahan sosial sebagai sebuah perubahan yang terjadi pada struktur sosial, ia mencakup perubahan yang terjadi pada pola-pola perilaku dan interaksi sosial. Perubahan sosial juga didefinisikan sebagai sebuah perubahan fenomena sosial yang terjadi pada berbagai dimensi kehidupan, baik pada skala individu maupun masyarakat. Mekanisme perubahan sosial dapat dipahami melalui berbagai perspektif; materialistis, idealistis, interaksional dan sumber struktural.<sup>4</sup>

Alur perubahan yang terjadi menurut perspektif di atas menempatkan agen perubahan pada posisi yang sangat strategis, tidak heran kalau agen perubahan menjadi salah satu strategi penting dalam perubahan sosial, selain dengan adanya target dan metode perubahan. Sosok yang kemudian menjadi agen perubahan tersebut dapat saja berasal dari pemerintah dan elit tertentu atau seorang pemuda dan kaum yang termarjinalkan. Seorang mahasiswa diharapkan juga mampu untuk menjadi agen perubahan, tidak hanya karena usianya yang masih muda, tetapi karena mereka dianggap sebagai kaum elit intelektual yang sebagiannya dapat saja berasal dari kelompok yang termarjinalkan.

Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kemenristekdikti Prof. dr. Ali Gufron Mukti menyatakan, perguruan tinggi harus mampu menjadi agen perubahan budaya. Mereka tidak melulu jadi menara gading

---

<sup>4</sup> Lauer, Robert H, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, Alih Bahasa, Alimandan S.U (*Perpective on Social Change*), (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2001), hlm.36.

yang fokus pada pendidikan dan penelitian tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat. Pembangunan bangsa tidak hanya pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu Perguruan Tinggi tidak bisa lagi menjadi 'menara gading' yang hasil penelitiannya sekedar wacana dan menjadi jurnal di perpustakaan.<sup>5</sup> Lebih lanjut dijelaskan bahwa penelitian yang dilakukan perguruan tinggi harus di implementasikan sektor industri.

Dengan demikian industri bisa mengembangkannya lebih luas untuk dimanfaatkan masyarakat luas. Telah dipahami oleh para pendidik bahwa misi pendidikan adalah mewariskan ilmu dari generasi ke generasi selanjutnya. Ilmu yang dimaksud antara lain: pengetahuan, tradisi, dan nilai-nilai budaya. Secara umum penulisan ilmu tersebut telah di emban oleh orang-orang yang terbebani terhadap generasi selanjutnya. Mereka diwakili oleh orang yang punya visi kedepan, yaitu menjadikan serta mencetak generasi yang lebih baik dan beradab. Peradaban kuno mencatat metode penyampaian ajaran lewat tembang dan kidung, puisi ataupun juga cerita sederhana yang biasanya tentang kepahlawanan

Proses perubahan sosial budaya masyarakat sebagaimana yang bicarakan di atas tikan akan pernah bisa kita hindari, sehingga akan menuntut lembaga pendidikan sebagai agen perubahan untuk menjawab segala permasalahan yang ada. Dalam permasalahan ini lembaga pendidikan haruslah memiliki konsep dan prinsip yang jelas, baik dari lembaga formal ataupun yang lainnya, demi terwujudnya cita-cita tersebut, kiranya maka perlulah diadakanya pembentukan kurikulum yang telah disesuaikan. Prinsip dasar pembentukan tersebut adalah meliputi; (1) Perumusan tujuan institusional yang meliputi; orientasi pada pendidikan nasional; Kebutuhan dan perubahan masyarakat; Kebutuhan lembaga. (2), Menetapkan isi dan struktur program. (3), Penyusunan strategi penyusunan dan pelaksanaan kurikulum.(4), Pengembangan program.<sup>6</sup>

Perguruan tinggi sebagai satuan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi memiliki kedudukan penting dalam proses perubahan social karena perguruan

---

<sup>5</sup>Ali Gufron Mukti, Dalam Konferensi Internasional Keperawatan di Sekolah Pascasarjana Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, pada tanggal 2 Desember 2015.

<sup>6</sup> Zakiah Darajat. *Ilmu Pendidikan Islam*. (Jakarta, Bumi aksara, 2000) hlm. 124-127

tinggi mengemban fungsi sebagai *agent of social change* dalam melakukan transformasi cultural kearah kondisi masyarakat yang lebih maju. Penjelasan lebih rinci dikemukakan Bamet.<sup>7</sup> Mengidentifikasi sedikitnya ada tiga fungsi perguruan tinggi, yaitu (1) Sebagai penghasil tenaga kerja yang bermutu, (2) sebagai lembaga pelatihan bagi karir peneliti, dan (3) sebagai organisasi pengelola yang efisien. Perguruan tinggi di Indonesia menjalankan tiga fungsi itu dengan mempertimbangkan ciri khas nasional sesuai dengan latar belakang historis, sosio kultural dan idiologis.

Dengan mempertimbangkan kekhasan itu, makaperguruan tinggi di Indonesia merupakan salah satu penggerak pembangunan nasional.<sup>8</sup> Peranannya dalam pembangunan nasional sekurang-kurangnya dapat dilihat dalam tiga hal; (1), sebagai penghasil agen-agen perubahan yang mampu merancang, mendorong, dan memelopori perubahan dalam berbagai aspek menuju masyarakat modern,(2), penciptadan pendukung ide-ide baru,dan (3), pemberi sumbangan bagi kemajuan intelektual dan sosial di masyarakat.<sup>9</sup>

Di Indonesia, selain pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan penyelenggaraan pendidikan, ada misi ketiga, yaitu pengabdian kepada masyarakat, sehingga muncul istilah Tri dharma Perguruan Tinggi. Sayangnya, kinerja perguruan tinggi dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi belum signifikan, sementara kiprahnya dalam pengabdian kepada masyarakat masih dipertanyakan. Setelah 70 tahun Indonesia merdeka, perguruan tinggi sebagai pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan sebagaimana yang dicita-citakan tampaknya belum terwujud. Bahkan, terkait dengan misi pendidikan pun, kontribusi perguruan tinggi belum optimal. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia sangat rendah.

Berdasarkan laporan *United Nations Development Programme*, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia pada tahun 2014 tidak beranjak dari tahun sebelumnya, tetap pada posisi 108 dari 187 negara yang dipantau, jauh di bawah Singapura (9), Brunei (30), Malaysia (62), dan Thailand (89),

---

<sup>7</sup> Barnett. *Teaching Reading in a Foreign Language*. (ERIC Digest., 1988). hlm. 17

<sup>8</sup> H.A.R.Tilaar. *Kekuasaan dan Pendidikan: Kajian Menejemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. (Jakarta: Rinika Cipta.2009), hlm. 94.

<sup>9</sup> Son Haji, *Perguruan Tinggi Dalam Pembangunan*. (Makalah), (Malang, IKIP, 1990), hlm. 45.

tetapi lebih baik dari Filipina (117), Vietnam (121), Kamboja (136), Laos (139), dan Myanmar (150).

Banyak survey lainnya yang mengindikasikan bahwa kualitas lulusan dan IPTEK yang dihasilkan oleh perguruan tinggi Indonesia pada umumnya masih sangat rendah. Ini mengarah pada kesimpulan bahwa kualitas program pendidikan dan penelitian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi Indonesia masih sangat rendah. Padahal perguruan tinggi mestinya menjadi agen penting dalam pembangunan bangsa.

Peran perguruan tinggi dalam pengembangan sumber daya manusia Indonesia ini sangat besar, terutama sebagai penghasil agen-agen perubahan yang mampu merancang, mendorong dan memelopori perubahan. Perguruan tinggi adalah pencipta dan pendukung gagasan-gagasan baru, dan perguruan tinggi telah memberi sumbangan yang besar bagi kemajuan intelektual dan sosial masyarakat.

Perguruan tinggi sebagai pendorong kemajuan intelektual dan sosial masyarakat memiliki posisi yang sangat strategis dalam membangun bangsa ini lewat pendidikan yang diselenggarakannya. Karena itu, kualitas perguruan tinggi harus senantiasa diperhatikan dan tidak diselenggarakan secara asal-asalan. Jika perguruan tinggi diselenggarakan secara asal-asalan, maka alumni yang dihasilkannya juga akan menjadi orang-orang yang asal-asalan. Karena itu pula, pemerintah harus lebih ketat lagi dalam melakukan pengawasan terhadap kualitas penyelenggaraan perguruan tinggi dan tidak dengan mudahnya memberikan izin penyelenggaraan perguruan tinggi jika sarana dan prasarana yang dibutuhkan tidak mendukung.

## **2. Perguruan Tinggi sebagai Pusat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.**

Posisi perguruan tinggi dimanapun berada, sedang mengalami perubahan yang sangat cepat, secara global perubahan terlihat dalam bentuk berkembangnya masyarakat informasi yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam situasi yang demikian penguasaan ilmu pengetahuan oleh individu dan atau organisasi akan menjadi prasyarat dan modal dasar bagi upaya pengembangan diri dan organisasi dalam situasi yang makin kompetitif.

Kondisi masyarakat yang demikian setiap orang dan atau organisasi terpaksa dan dipaksa untuk selalu

memperbaharui pengetahuan dan keterampilan jika ingin tetap hidup dan berkembang. Keadaan yang demikian menurut Prof. Sularso,<sup>10</sup> disebabkan oleh cepatnya perubahan kebutuhan kompetensi perorangan maupun organisasi dalam dunia yang penuh perubahan dan persaingan.

Situasi yang demikian memerlukan respon proaktif dari seluruh lapisan masyarakat, terlebih lagi perguruan tinggi sebagai *center of excellence*,<sup>11</sup> jelas harus melakukan *repositioning* dalam konteks lingkungan eksternal melalui upaya *restructuring* internal yang terencana dengan baik, dilaksanakan dengan baik, dan dievaluasi dengan baik secara berkesinambungan dalam bingkai semangat *continous updating*.

Lebih jauh, perubahan cepat yang terjadi di masyarakat perlu disikapi secara tepat dengan melakukan refleksi mendalam tentang apa peran perguruan tinggi yang telah dimainkan sekarang ini, serta bagaimana kemungkinan peran tersebut di masa datang, untuk menjawab hal ini nampaknya diperlukan suatu analisis mendalam tentang kondisi aktual serta analisis prediktif tentang kemungkinan-kemungkinan peran di masa datang dengan memahami trend yang sedang terjadi, dengan kata lain analisis situasi yang bisa menjelaskan sejarah masa depan, hal ini jelas sangat penting agar peran perguruan tinggi dapat tetap terjaga meski hal ini mungkin

---

<sup>10</sup> Prof. Sulaeso, *Dasar Perencanaan dan Pemilihan*, Cetakan Kesembilan, ( Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 1997) hlm. 112

<sup>11</sup>Disinilah paradigma *Center Of Excellence* (pusat keunggulan) menampakkan bentuknya.Paradigma kampus sebagai *Center Of Excellence* menghendaki manajemen kampus menjadi sebuah manajemen yang rapih dan bisa menjalankan tujuan-tujuannya secara efektif dan efisien.Paradigma *Center Of Excellence* juga menghendaki kampus sebagai sebuah sistem dengan segala dinamikanya yang mencerminkan vitalitas dan gairah dalam membangun karakter mahasiswanya dengan sungguh-sungguh.Pendidikan yang dijalankan adalah pendidikan dengan basis pembangunan karakter.Sementara karakter yang dibangun adalah religious dan humanis. Paradigma ini juga menuntut adanya maksimalisasi peran kampus dalam pengkajian produk-produk akademis dengan orientasi pembangunan kesejahteraan masyarakat. Paradigma ini menekankan kampus sebagai sebuah sistem yang menampilkan kesungguh-sungguhan serta profesionalitas tingkat tinggi dalam segala aspeknya. Kampus sebagai *Center Of Excellence* menjunjung tinggi integritas dan menjaga nilai-nilai *Good Governance* jauh dari korupsi dan keculasan lainnya.Budaya korup baik itu dipraktikkan oleh mahasiswanya melalui nyontek saat ujian atau menitipkan absen atau juga pemalsuan data skripsi maupun oleh birokrat kampusnya yang menyelewengkan dana mahasiswa nya adalah cerminan gagalnya proses pendidikan di Perguruan Tinggi. (lihat: Fahriroji dalam *Kampus adalah mata air, mengaplikasikan kampus sebagai center of excellence*.)

menuntut perubahan posisi keberadaannya dibanding sekarang.

Dari perpekstif filosofis, perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang sangat cepat, telah makin mengokohkan faham pemikiran Pragmatisme-utilitarianisme, dimana segala sesuatu cenderung dilihat dari sudut manfaat dan kegunaan praktis bagi kehidupan, keadaan ini telah mengakibatkan pemahaman dan orientasi pendidikan mengalami pragmatisasi, dimana sebelumnya pendidikan lebih dilihat secara ideal sebagai upaya untuk mendewasakan manusia melalui pendekatan budaya, tanpa atau kurang memperhatikan dampak praktisnya atau lebih khusus dampak ekonomi bagi kehidupan masyarakat.

Kondisi obyektif yang demikian menjadikan tuntutan masyarakat terhadap pendidikan/lembaga pendidikan termasuk perguruan tinggi mengalami pergeseran dari tuntutan yang sifatnya idealis ke arah tuntutan yang lebih praktis-pragmatis. Namun demikian nampaknya akan sangat bijak apabila pergeseran tersebut dilihat sebagai gerak bandul dengan dua ujung, dimana yang satu sama sekali tidak menafikan yang lain, idealisme tidak dianggap sebagai pengekang pragmatisme, dan pragmatisme tidak dianggap akan menghapus pemahaman ideal tentang pendidikan.

Sebuah keniscayaan bahwa, dimensi ekonomi dewasa ini telah mendominasi tuntutan masyarakat terhadap dunia pendidikan, lembaga pendidikan yang lulusannya mudah mendapat pekerjaan sangat diminati, hal ini bukan sesuatu yang salah bahkan sangat rasional, namun lembaga pendidikan perlu mensikapinya dengan tepat, sebab pertimbangan masyarakat bertumpu pada dimensi sekarang dan kekinian dengan lingkup parsial, sedangkan lembaga pendidikan mesti mempertimbangkan juga dimensi keakanan sehingga lebih bersifat holistik.

Sebagai upaya merespon hal tersebut di atas, diperlukan upaya untuk memampukan perguruan tinggi menjadi pelopor dalam pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang terintegrasi guna memenuhi; (1) kebutuhan warga masyarakat yang berorientasi ideal atas pendidikan, melalui penciptaan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya spirit akademik yang dinamis, serta dapat menjadi wahana sosialisasi nilai-nilai, norma, dan sikap mandiri, dan (2) kebutuhan masyarakat yang berorientasi pragmatis

melalui kesiapan mendidik manusia yang dapat terserap oleh dunia usaha sesuai spesifikasinya masing-masing.

Secara fundamental akan berpengaruh pada bagaimana proses pembelajaran di perguruan tinggi diselenggarakan, dan untuk ketepatan merespon maka pemahaman mengenai trend modus pembelajaran perlu dicermati agar pendidikan di perguruan tinggi dapat tetap berperan dan mampu menjangkau berbagai kelompok masyarakat yang membutuhkannya.<sup>12</sup>

HAR Tilaar<sup>13</sup>, menjelaskan ada tiga unsur dalam transformasi kebudayaan, yaitu : (1) Unsur-unsur yang ditransformasikan, (2) Proses transformasi, dan (3) Cara transformasi. Unsur-unsur transformasi kebudayaan adalah nilai-nilai budaya, adat-istiadat masyarakat, pandangan mengenai hidup serta berbagai konsep hidup lainnya yang ada di dalam masyarakat; berbagai kebiasaan sosial yang digunakan dalam interaksi atau pergaulan para anggota masyarakat tersebut; berbagai sikap dan peranan yang diperlukan di dalam dunia pergaulan dan akhirnya berbagai tingkah-laku lainnya termasuk proses fisiologi, refleksi dan gerak atau reaksi-reaksi tertentudan penyesuaian fisik termasuk gizi dan tata-makanan untuk dapat bertahan hidup.

Unsur itulah yang merupakan ikhtiar kebudayaan yang memungkinkan berkembangnya peradaban manusia. Dalam konteks ini, maka pendidikan tidak hanya merupakan pengalihan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga meliputi pengalihan nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial. Kiranya dapat dikatakan bahwa tiap masyarakat sebagai pengemban budaya berkepentingan untuk memelihara keterjalinan antara berbagai upaya pendidikan dengan usaha pengembangan kebudayaan. Kesenambungan hidup bermasyarakat turut dipengaruhi oleh berlangsungnya pengalihan nilai budaya dan norma sosial dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Keberlangsungan ini dimungkinkan oleh orientasi pada nilai budaya yang sama serta konformisme perilaku berdasarkan sosial yang berlaku. Demikianlah pendidikan bermakna sebagai proses pembudayaan dan seiring bersama

---

<sup>12</sup> Dr.Uhar Suharsaputra, *Pendidikan dan Peran Perguruan Tinggi*, <https://uharsputra.wordpress.com> diakses pada tanggal 25 April 2016.

<sup>13</sup> Tilaar, H.A.R., *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia*, (Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya, 1999). hlm. 54

itu berkembanglah sejarah peradaban manusia. Seluruh spektrum kebudayaan: sistem kepercayaan, bahasa, seni, sejarah, dan ilmu-ilmu dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya bisa ditransformasikan dari satu generasi ke generasi lain melalui pendidikan dalam arti luas. Maka pendidikan sebagai prakarsa yang meliputi proses pengalihan pengetahuan dan keterampilan serentak dengan proses pengalihan nilai-nilai budaya. Proses itu sekaligus menjamin terpeliharanya jalinan antar generasi dalam suatu masyarakat. Orientasi pada nilai-nilai budaya pada gilirannya menjelmakan perilaku manusia sebagai anggota masyarakat dengan peradabannya yang khas. Sejauh mana masyarakat itu berorientasi pada nilai-nilai budayanya, menentukan tanggungjawabnya ketahanan budaya masyarakat yang bersangkutan, yang terutama terukur melalui apa yang terjadi dalam pelbagai pertemuan antar budaya. Hal ini nyata melalui sejarah timbul tenggelamnya pelbagai ranah budaya dan peradaban manusia sepanjang zaman. Maka dapat dipahami jika pendidikan juga ditujukan pada peneguhan ketahanan budaya.

### 3. Perguruan Tinggi sebagai *Moral Force* Pemberantasan Korupsi.

Istilah korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan merusak, berdasarkan kenyataan tersebut perbuatan korupsi menyangkut: sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam kamus hukum, yang dimaksud *corruptie* adalah korupsi, perbuatan curang, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan Negara.<sup>14</sup> Selanjutnya Baharudin Lopa mengutip pendapat David M. Chalmers, menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Hal ini diambil dari definisi yang

---

<sup>14</sup> R. Subekti dan Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum*. (Jakarta: Pradnya Paramita.1973), hlm.46

berbunyi "*financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled corrupt*".<sup>15</sup>

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, baik berasal dari dalam diri pelaku atau dari luar pelaku. Sebagaimana dikatakan Yamamah bahwa ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih mendewakan materi maka dapat memaksa terjadinya permainan uang dan korupsi.<sup>16</sup> Dengan kondisi itu hampir dapat dipastikan seluruh pejabat kemudian terpaksa korupsi kalau sudah menjabat. Penyebab seseorang melakukan korupsi adalah karena ketergodaannya akan dunia materi atau kekayaan yang tidak mampu ditahannya.

Ketika dorongan untuk menjadi kaya tidak mampu ditahan sementara akses ke arah kekayaan bisa diperoleh melalui cara berkorupsi, maka jadilah seseorang akan melakukan korupsi. Dengan demikian, jika menggunakan sudut pandang penyebab korupsi seperti ini, maka salah satu penyebab korupsi adalah cara pandang terhadap kekayaan. Cara pandang terhadap kekayaan yang salah akan menyebabkan cara yang salah dalam mengakses kekayaan. Korupsi akan terus berlangsung selama masih terdapat kesalahan tentang cara memandang kekayaan. Semakin banyak orang salah dalam memandang kekayaan, semakin besar pula kemungkinan orang melakukan kesalahan dalam mengakses kekayaan. Perilaku orang-orang yang memandang kekayaan dan uang sebagai suatu hal yang punya arti segala-galanya. Bagaimana bentuk penyadaran yang tepat.

Pandangan lain dikemukakan oleh Arifin yang mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi antara lain: (1) aspek perilaku individu (2) aspek organisasi, dan (3) aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada.<sup>17</sup> Terhadap aspek perilaku individu, Isa Wahyudi memberikan gambaran, sebab-sebab seseorang melakukan korupsi dapat berupa dorongan dari dalam dirinya, yang dapat pula dikatakan sebagai keinginan, niat, atau kesadaran untuk melakukan.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Hartanti Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: SinarGrafika, 2008). hlm. 76

<sup>16</sup> Yamamah, Ansari. *Perilaku Konsumtif Penyebab Korupsi*. (Jakarta, Gramedia, 2009), hlm. 29

<sup>17</sup> Arifin. *Strategi Belajar Mengajar*. (Bandung: Jurusan Pendidikan Kimia FPMIPA UPI., 2000), hlm. 89

<sup>18</sup> Wahyudi, Isa. *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*, (Malang: In.Trans Publishing. 2008). hlm. 34

Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Perilaku korup seperti penyuapan, politik uang merupakan fenomena yang sering terjadi. Terkait dengan hal itu Gomes memberikan gambaran bahwa politik uang (*money politik*) sebagai *use of money and material benefits in the pursuit of political influence*.<sup>19</sup> Korupsi pada level pemerintahan adalah dari sisi penerimaan, pemerasan uang suap, pemberian perlindungan, pencurian barang-barang publik untuk kepentingan pribadi, tergolong korupsi yang disebabkan oleh konstelasi politik.

Sementara menurut De Asis, korupsi politik misalnya perilaku curang (politik uang) pada pemilihan anggota legislatif ataupun pejabat-pejabat eksekutif, dana ilegal untuk pembiayaan kampanye, penyelesaian konflik parlemen melalui cara-cara ilegal dan teknik lobi yang menyimpang.<sup>20</sup> Menurut Mochtar Mas'oed, mendiskripsikan bahwa dalam masyarakat dengan ciri pelembagaan politik eksklusif dimana kompetisi politik dibatasi pada lapisan tipis elit dan perbedaan antar elit lebih didasarkan pada klik pribadi dan bukan pada isu kebijakan, yang terjadi pada umumnya desakan kultural dan struktural untuk korupsi itu betul-betul terwujud dalam tindakan korupsi para pejabatnya.<sup>21</sup>

Proses politik uang (*money politics*) merupakan tingkah laku negatif karena uang digunakan untuk membeli suara atau menyogok para pemilih atau anggota-anggota partai supaya memenangkan pemilu si pemberi uang. Penyimpangan pemberian kredit atau penarikan pajak pada pengusaha, kongsi antara penguasa dengan pengusaha, kasus-kasus pejabat Bank Indonesia dan Menteri di bidang ekonomi pada rezim lalu dan pemberian cek melancong yang sering dibicarakan merupakan sederet kasus yang menggambarkan aspek politik yang dapat menyebabkan korupsi.

---

<sup>19</sup> Gomes, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cetakan Keempat, (Yogyakarta , ANDI, 2000), hlm.113

<sup>20</sup> De Asis, Maria Gonzales, *Coalition-Building to Fight Corruption*, Paper Prepared for the Anti-Corruption Summit, World Bank Institute, November 2000.

<sup>21</sup>Almond, Gabriel. "Kelompok Kepentingan dan Partai Politik", dalam Mochtar Mas'oed dan Collin Mac.Andrew, *Perbandingan Sistem Politik*, (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2001). hlm.78

Keberadaan Perguruan Tinggi memiliki peranan yang sangat penting dalam memberantas praktek korupsi. Peran dan fungsi Perguruan Tinggi ini sebagai implementasi dari tri darma yang menjadi kewajibannya, dapat diwujudkan dalam bentuk membangun gerakan pembelajaran masyarakat untuk mendorong terciptanya transformasi sosial dan terjaganya nilai-nilai budaya bangsa yang anti korupsi.

Perguruan tinggi juga dapat mengembangkan model pembangunan yang benar-benar berbasis pada moralitas, keilmuan dan sumberdaya lokal dalam kerangka sistem nilai budaya bangsa, membangun basis-basis pengembangan keilmuan yang benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat dalam rangka merespon perubahan global yang sangat dinamis, mengembangkan pusat-pusat pengembangan masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya dan nilai-nilai lokal yang ada, membantu pengembangan kebijakan strategis terhadap legislatif dan eksekutif serta mengontrol implementasi kebijakan-kebijakan tersebut.

Perguruan Tinggi juga dapat berperan dalam mengembangkan strategi kebudayaan yang bermoral, hal tersebut sangat diperlukan dalam membangun peradaban bangsa, terutama untuk membangun nilai-nilai yang terkandung dalam Al Qur'an, tentu sejalan dengan kemajemukan bangsa agar keberagaman dan keberagaman diterima sebagai sebuah kekayaan dan tidak dipertentangkan. Oleh karena itu, pembangunan peradaban itu sendiri perlu berbasis pada nilai etika dan nilai budaya yang sudah melekat dalam jari diri bangsa.

Korupsi merupakan penyakit negara yang sangat berdampak pada pembangunan, tatanan sosial dan juga politik. Korupsi mempunyai karakteristik sebagai kejahatan yang tidak mengandung kekerasan dengan melibatkan unsur-unsur tipu daya muslihat, ketidakjujuran dan penyembunyian suatu kenyataan. Perilaku korupsi jauh dari budaya bangsa Indonesia yang menjunjung nilai kejujuran dan kesederhanaan sebagai budaya bangsa.

Permasalahan yang cukup pelik seputar krisis multi dimensional serta problem lain yang menyangkut tatanan nilai yang sangat menuntut adanya upaya pemecah yang sangat mendesak. Problematika yang menyangkut struktur nilai dalam masyarakat salah satunya adalah problematika korupsi yang tidak kunjung usai. Semakin akutnya permasalahan tersebut, sebagian orang menganggap bahaya

laten korupsi di Indonesia sudah menjadi budaya dan epidemi bahkan virus yang harus kita perangi bersama. Indonesia dianugerahi kekayaan alam yang melimpah ruah, yang seharusnya dengan keadaan tersebut Indonesia dapat menjadi negara maju. Namun pada kenyataannya pemerintah Indonesia masih banyak hutang dan rakyatnya pun terlilit dalam kemiskinan permanen. Dari zaman pemerintahan kerajaan, kemudian zaman penjajahan, dan hingga zaman modern dalam pemerintahan NKRI dewasa ini, kehidupan rakyatnya tetap saja miskin.

Dalam perkembangan selanjutnya di tengah kemiskinan yang makin meluas, korupsi berkembang menjadi cara berfikir dan gaya hidup masyarakat untuk memperoleh kekayaan dan menjadi jalan pintas untuk memperkaya diri atau golongan secara cepat.<sup>22</sup> Korupsi memang merupakan problematika yang cukup pelik yang hampir menjamur di seluruh negara, tak terkecuali Indonesia. Bagi rakyat Indonesia, bukan hal yang asing bahwa aksi penolakan korupsi mulai terdengar kencang, masyarakat pun dibuat heran ketika kasus suap oleh ketua Mahkamah Konstitusi. Lembaga negara yang seharusnya bersih dari korupsi, tapi karena lunturnya moral mengotori lembaga yang sangat disegani karena ketegasannya, berwibawa dan bersih. Perbaikan sistem dan hukum sudah diperbaiki.

Lunturnya moralitas, menyebabkan sistem yang baik tersebut tidak ada gunanya. Mahasiswa sebagai *agen of change* seharusnya dapat menjadi pionir terdepan untuk memberantas dan juga untuk mencegah terjadinya kasus korupsi di Indonesia. Institusi pendidikan diyakini sebagai tempat terbaik untuk menyebarkan dan menanamkan nilai-nilai antikorupsi. Mahasiswa beserta civitas akademik yang akan menjadi tulang punggung bangsa di masa mendatang sejak dini harus diajar dan dididik untuk membenciserta menjauhi praktek korupsi. Bahkan lebih dari itu, diharapkan dapat turut aktif memerangnya. Praktek korupsi di lingkungan kampus masih banyak di temui, Diberitakan di berbagai media massa, sekurangnya ada 18 universitas negeri di Indonesia yang terindikasi terjadi tindak pidana korupsi dengan rata-rata kerugian miliaran rupiah.

---

<sup>22</sup> Andar Nubowo. *Membangun Gerakan Anti Korupsi dalam Perspektif Pendidikan*, (Yogyakarta, LP3, 2004) . hlm. 45

Gagasan pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi pada 29 September tahun 2002 merupakan sebuah itikad baik dari pemerintahan saat itu. KPK menjadi harapan baru bagi Indonesia untuk mengobati penyakit bangsa yang sudah kronis. Sampai saat ini KPK sudah menunjukkan prestasi yang mengaggumkan ditengah dahaga akan pemberantasan korupsi bangsa ini. Mengingat begitu beratnya tugas KPK dan besarnya akibat yang disebabkan oleh kasus korupsi, maka diperlukan suatu sistem yang mampu menyadarkan semua elemen bangsa untuk sama-sama bergerak mengikis karang korupsi yang telah menggurita. Cara yang paling efektif adalah melalui media pendidikan.

Korupsi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yaitu; (1), Sistem pemerintahan dan birokrasi yang memang kondusif untuk melakukan penyimpangan; (2), Belum adanya sistem kontrol dari masyarakat yang kuat, dan belum adanya perangkat peraturan dan perundang-perundangan yang tegas; (3), Tindak lanjut dari setiap penemuan pelanggaran yang masih lemah dan belum menunjukkan "greget" oleh pimpinan instansi. Lebih lanjut lagi, penyebab terjadinya korupsi dibagi dalam tiga aspek. Pertama, aspek perilaku individu organisasi. Kedua, aspek organisasi. Ketiga, aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada.<sup>23</sup>

Dalam upaya untuk menciptakan sebuah tatanan kehidupan yang bersih, diperlukan sebuah sistem pendidikan anti korupsi yang berisi tentang sosialisasi bentuk-bentuk korupsi, cara pencegahan dan pelaporan serta pengawasan terhadap tindak pidana korupsi. Pendidikan seperti ini harus ditanamkan secara terpadu mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Pendidikan anti korupsi ini akan berpengaruh pada perkembangan psikologis mahasiswa. Ada dua tujuan yang ingin dicapai dari pendidikan anti korupsi ini, yaitu: (1), Untuk menanamkan semangat anti korupsi pada setiap anak bangsa. Melalui pendidikan ini, diharapkan semangat anti korupsi akan mengalir di dalam darah setiap generasi dan tercermin dalam perbuatan sehari-hari. Sehingga, pekerjaan membangun bangsa yang terseok-seok karena adanya korupsi dimasa depan tidak ada terjadi lagi. Jika korupsi sudah diminimalisir, maka setiap pekerjaan membangun bangsa akan maksimal; (2), Untuk membangun

---

<sup>23</sup> Wahyudi, I & Sopanah. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Malang Raya*. (Online), (<http://www.ejournal.umm.ac.id>), diakses 27 april 2015.

nilai-nilai dan mengembangkan kapasitas yang diperlukan untuk membentuk posisi sipil murid dalam melawan korupsi; (3) Menyadari bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian dan Kejaksaan agung, melainkan menjadi tanggung jawab setiap anak bangsa.

Korupsi telah mewabah hampir pada seluruh sendi kehidupan bangsa Indonesia. Kejahatan luar biasa ini memerlukan upaya yang luar biasa untuk memberantasnya. Salah satu upaya untuk memberantasnya adalah memberikan pembekalan kepada mahasiswa sebagai pewaris masa depan. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menyelenggarakan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia.<sup>24</sup>

Model pendidikan yang sistematis akan mampu membuat mahasiswa mengenal lebih dini hal-hal yang berkenaan dengan korupsi termasuk sanksi yang akan diterima kalau melakukan korupsi. Dengan begitu, akan tercipta generasi yang sadar dan memahami bahaya korupsi, bentuk-bentuk korupsi dan tahu akan sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi. Sehingga, masyarakat akan mengawasi setiap tindak korupsi yang terjadi dan secara bersama memberikan sanksi moral bagi koruptor. Gerakan bersama anti korupsi ini akan memberikan tekanan bagi penegak hukum dan dukungan moral bagi Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga lebih bersemangat dalam menjalankan tugasnya.

Program pendidikan anti korupsi yang dilaksanakan secara sistemik di semua tingkat institusi pendidikan, diharapkan akan memperbaiki pola pikir bangsa tentang korupsi. Selama ini, sangat banyak kebiasaan-kebiasaan yang telah lama diakui sebagai sebuah hal yang lumrah dan bukan korupsi. Termasuk hal-hal kecil. Misalnya, sering terlambat dalam mengikuti sebuah kegiatan, terlambat masuk sekolah, kantor dan lain sebagainya. Salah satu bentuk korupsi, korupsi waktu. Kebiasaan tidak disiplin terhadap waktu ini sudah menjadi lumrah, sehingga perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat. Materi ini dapat diikutkan dalam pendidikan anti korupsi ini. Begitu juga dengan hal-hal sepele lainnya.

---

<sup>24</sup>Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2012. *Pendidikan Anti Korupsi*. (Online), (<http://www.dikti.go.id>), diakses 27 april 2016.

Matakuliah Pendidikan Antikorupsi lebih menekankan pada pembangunan karakter anti korupsi pada diri individu mahasiswa. Tujuan dari matakuliah Pendidikan Antikorupsi adalah membentuk kepribadian anti-korupsi pada diri pribadi mahasiswa serta membangun semangat dan kompetensinya sebagai *agent of change* bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari ancaman korupsi. Dengan menyesuaikan tingkat peserta didik yaitu mahasiswa tingkat sarjana (S1), maka kompetensi yang ingin dicapai adalah; (1), Mahasiswa mampu mencegah dirinya sendiri agar tidak melakukan tindak korupsi (*individual competence*); (2), Mahasiswa mampu mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak korupsi dengan cara memberikan peringatan orang tersebut; (3), Mahasiswa mampu mendeteksi adanya tindak korupsi (dan melaporkannya kepada penegak hukum).<sup>25</sup>

Perilaku korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk luar biasa pada hampir seluruh sendi kehidupan. Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan di negeri ini. Dilain pihak upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Korupsi dalam berbagai tingkatan tetap saja banyak terjadi seolah-olah telah menjadi bagian dari kehidupan kita yang bahkan sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Jika kondisi ini tetap kita biarkan berlangsung maka cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini.

Perilaku korupsi harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang oleh karena itu memerlukan upaya luar biasa pula untuk memberantasnya. Upaya pemberantasan korupsi yang terdiri dari dua bagian besar, yaitu (1) penindakan, dan (2) pencegahan tidak akan pernah berhasil optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat yang merupakan pewaris masa depan diharapkan dapat terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

---

<sup>25</sup> Puspito, N dan Tim Penyusun. *Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. (Jakarta, Kemendikbud.2011), hlm. 5-16.

Keterlibatan civitas akademika dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya. Yang tidak kalah penting, untuk dapat berperan aktif mahasiswa harus dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Upaya pembekalan mahasiswa dapat ditempuh dengan berbagai cara antara lain melalui kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar atau perkuliahan. Untuk keperluan perkuliahan dipandang perlu untuk membuat sebuah modul yang berisikan materi dasar mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi bagi mahasiswa. Pendidikan Anti Korupsi bagi mahasiswa bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Tujuan jangka panjangnya adalah menumbuhkan budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dan mendorong mahasiswa untuk dapat berperan serta aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pemberian Pendidikan Anti korupsi kepada masyarakat, khususnya mahasiswa tersebut merupakan salah satu usaha preventif memberantas korupsi yang diharapkan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Partisipasi masyarakat dalam usaha preventif ini dapat dijadikan sebagai suatu usaha prioritas mengingat ketidakberdayaan hukum di Indonesia dalam memberantas korupsi. Selan itu, *United Nations Against Corruption*,<sup>26</sup> mengemukakan kelebihan usaha

---

<sup>26</sup> Tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan iritegritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Oleh karena korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematis dan merugikan pembangunan berkelanjutan sehingga memerlukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional. Dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen tata pemerintahan yang baik dan kerja sama internasional, termasuk pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi. Selama ini pencegahan dan

preventif (pencegahan) dibandingkan usaha represif (penanganan) dalam memberantas korupsi, dua di antaranya adalah dampak korupsi yang sangat luas tidak dapat ditanggulangi melalui pendekatan represif semata dan di dalam sistem peradilan yang masih rentan atas korupsi, tindakan represif tidak akan berfungsi optimal.<sup>27</sup>

Modul Pendidikan Anti Korupsi ini berisikan bahan ajar dasar yang dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Perguruan Tinggi dan Program Studi masing-masing. Bahan ajar dasar yang dituliskan dalam buku ini terdiri dari delapan bab, yaitu: (1) Pengertian Korupsi, (2) Faktor Penyebab Korupsi, (3) Dampak Masif Korupsi, (4) Nilai dan Prinsip Anti Korupsi, (5) Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia, (6) Gerakan, Kerjasama dan Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi, (7) Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-undangan, dan (8) Peranan Mahasiswa dalam Gerakan Anti Korupsi. Disamping delapan bab yang berisikan bahan ajar dasar, buku ini juga dilengkapi dengan panduan pembelajaran yang berjudul Model Pembelajaran Matakuliah Anti yang dituliskan dalam bagian I, untuk memudahkan pengajaran Pendidikan Anti Korupsi.

Sebagai intisari dari tulisan ini, Prof Dr Abuddin Nata MA, Guru Besar Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Jakarta,<sup>28</sup> menjelaskan panjang lebar bahwa; Timbulnya korupsi sebagaimana tersebut di atas dicermati kita dapat menemui bahwa penyebab terjadinya korupsi adalah (1) Tekanan sosial yang menyebabkan manusia melakukan pelanggaran terhadap norma-norma. Sistem sosial yang menyebabkan timbulnya tekanan yang mengakibatkan banyak orang yang tidak mempunyai akses atau kesempatan di dalam struktur tersebut, karena pembatasan-pembatasan atau diskriminasi rasial, etnis, kekurangan keterampilan,

---

pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan khusus yang berlaku sejak tahun 1957 dan telah diubah sebanyak 5 (lima) kali, akan tetapi peraturan perundang-undangan dimaksud belum memadai, antara lain karena belum adanya kerja sama internasional dalam masalah pengembalian hasil tindak pidana korupsi. (lihat: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

<sup>27</sup> Kejaksaan Republik Indonesia. 2009. *Tindakan Preventif dan Represif dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. (Online), (<http://www.kejaksaan.go.id>), diakses 26 april 2016.

<sup>28</sup> <http://www.uinjkt.ac.id/id/pendidikan-tinggi-islam-dan-upaya-anti-korupsi>, diakses pada tanggal 25 April 2016.

kapital, dan sumber-sumber lainnya; (2) Karena adanya sikap *partikularisme*,<sup>29</sup> (3) Sikap mental yang meremehkan mutu; (4) Sikap mental yang suka menerabas; (5) Sikap tak percaya pada diri sendiri; (6) Sikap tak berdisiplin murni, dan (7) Sikap mental yang suka mengabaikan tanggung jawab yang kokoh.

Dari ketujuh macam penyebab terjadinya korupsi tersebut di atas, sesungguhnya dapat dikategorikan menjadi dua sebab. Pertama sebab yang bersifat sistem, yakni sistem sosial yang menekan dan diskriminatif, dan yang kedua adalah sebab yang bersifat sikap mental. Jika kedua masalah ini dihubungkan dengan peran dan misi Perguruan Tinggi Islam, maka terdapat sejumlah catatan tentang cara pemberantasan korupsi tersebut sebagai berikut; *Pertama*, bahwa Perguruan Tinggi Islam mengemban misi perbaikan moral. Kata Islam yang menjadi sifat atau identitas Perguruan Tinggi tersebut, mengandung arti bahwa Perguruan Tinggi tersebut harus melaksanakan misi pelaksanaan ajaran Islam yang pada intinya membawa rahmat bagi seluruh alam, menciptakan keamanan, kedamaian, kesejahteraan lahir dan batin, serta mencegah orang dari berbuat yang keji, jahat, munkar, merugikan orang lain. Perbuatan korupsi termasuk ke dalam perbuatan yang merugikan dan menyengsarakan orang lain, dan termasuk perbuatan jahat. Dengan kata lain kata Islam yang disandang oleh Perguruan Tinggi tersebut menuntut Perguruan Tinggi tersebut terlibat aktif dalam pemberantasan kejahatan yang merugikan orang lain.

Perguruan Tinggi Islam saat ini mengalami perkembangan yang luar biasa. Di dalamnya ada akademik sekolah tinggi, institut dan universitas. Jika pada Perguruan Tinggi Islam yang sudah menjadi Universitas, yang diajarkan di dalamnya bukan hanya ilmu-ilmu agama saja, melainkan juga ilmu umum. Sedangkan pada Perguruan Tinggi Islam

---

<sup>29</sup> Perasaan kewajiban untuk membantu, membagi-bagi sumber kepada pribadi-pribadi yang dekat pada seseorang), nepotisme (sikap loyal terhadap kewajiban partikularistik) yang merupakan ciri dari suatu masyarakat prakapitalis atau masyarakat feodal. Partikularisme ini bertentangan dengan universalisme (komitmen untuk bersikap sama terhadap yang lain); Partikularisme yaitu segala sesuatu yang ada hubungannya dengan apa yang khusus berlaku untuk suatu daerah tertentu saja, ada hubungannya dengan perasaan subyektif dan rasa kebersamaan. (lihat: Angga Restu Pambudi, Ciri-Ciri Masyarakat Tradisional dan Modern, <https://anggarestupambudi.wordpress.com> diakses pada tanggal 28 April 2016.

dalam bentuk akademi, sekolah tinggi atau institut hanya diajarkan ilmu-ilmu agama saja.

Dengan demikian, pada seluruh bentuk dan tingkatan Perguruan Tinggi Islam itu diajarkan ilmu-ilmu agama. Ilmu-ilmu agama Islam yang berbasiskan pada ajaran al-Qur'an dan al-Sunnah membawa misi perbaikan moral, karena inti ajaran al-Qur'an dan al-Sunnah adalah perbaikan moral. Bahwa inti ajaran al-Qur'an adalah moral yang bertumpu pada hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Inti ajaran al-Qur'an tentang moral tersebut, selain untuk dipahami dan dihayati, namun yang terpenting lagi diamalkan. Ajaran al-Qur'an tentang moral tersebut bukan hanya untuk dihafal, melainkan dipraktekkan dengan sungguh-sungguh.

Untuk itu gerakan akhlak mulia yang digagas dan dideklarasikan oleh Irsyad Sudiro, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia baru-baru ini perlu, mendapatkan dukungan dari semua pihak. Upaya ini terkait dengan upaya mengatasi terjadinya korupsi yang disebabkan karena rendahnya mutu sikap mental atau akhlak yang dianut oleh masyarakat. *Kedua*, Perguruan Tinggi Islam dapat mengambil peran pemberantasan korupsi tersebut melalui upaya mendorong terciptanya system sosial yang egaliter dan demokratis. Faham egaliter ini didasarkan pada ajaran Islam yang mengakui adanya pluralisme, heterogenitas atau kemajemukan. Ajaran Islam mengakui bahwa umat manusia diciptakan oleh Tuhan dengan latar belakang agama, budaya, bahasa, suku bangsa, warna kulit, adat istiadat, pangkat, jabatan, tingkat ekonomi, kecerdasan, bakat, jenis kelamin, kecantikan atau ketampanan, tempat tinggal dan lain sebagainya yang amat beragam.

Dari keadaan tersebut selanjutnya dapat dibagi ke dalam dua bagian, yang pertama mereka yang berada dalam keberuntungan dan yang kedua yang berada dalam kekurangan-beruntungan. Mereka yang kurang beruntung itu bisa jadi karena system sosial yang ada kurang mendukungnya yang menyebabkan ia mengambil sikap menerabas. Keadaan ini harus diperbaiki dengan mengembangkan sikap hidup yang egaliter yang memandang bahwa manusia dalam pandangan agama berada dalam kesederajatan antara satu dan lainnya, kecuali siapa di antara mereka yang paling bertakwa kepada Tuhan.

Sikap tersebut diikuti pula dengan mengembangkan sikap yang demokratis dalam arti yang sesungguhnya. Berbagai proses pengambilan keputusan dalam bidang pendidikan, hukum, ekonomi, dan lain sebagainya harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Masyarakat yang diperlakukan tidak demokratis akan memberontak dan mencari jalan keluar dalam bentuk pelanggaran. *Ketiga*, Pendidikan Tinggi, sebagaimana pendidikan lainnya memiliki sasaran yang sama, yaitu mempengaruhi orang lain agar berubah pola pikir, perasaan dan tingkah lakunya dengan cara memberikan wawasan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, penugasan, dan sebagainya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Dalam melakukan merubah wawasan, pengetahuan, dan perilaku manusia tersebut dunia Pendidikan Tinggi telah memiliki pengalaman dan berbagai macam metode dan pendekatan yang bermacam-macam yang dihasilkan para ahli metodologi. Berbagai pendekatan ini hendaknya dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka merubah perilaku yang korup menjadi perilaku yang amanah. Di dalam ajaran agama terdapat berbagai metode yang dianggap paling efektif untuk memberantas korupsi. Metode tersebut adalah pembiasaan, keteladanan dan hukuman. Dengan pembiasaan ini, seseorang diajak serta secara nyata membiasakan perbuatan yang baik, dan menjauhi perbuatan yang buruk. Pembiasaan tersebut dilakukan secara kontinyu dan konsisten, sehingga perbuatan tersebut mendarah-daging. Sebagai contoh bangsa di negara-negara lain yang dapat mewujudkan kebersihan, adalah karena mereka dibiasakan hidup bersih dengan membuang sampah pada tempatnya, sehingga perbuatan tersebut menjadi budaya dan menimbulkan rasa malu jika tidak dapat melakukannya.

Pembiasaan tersebut diikuti pula dengan memberikan contoh teladan dari pimpinan, orang tua dan lainnya, sehingga kebiasaan tersebut semakin kokoh tertanam. Selanjutnya hukuman dapat pula digunakan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran, sehingga keadaan tersebut akan menimbulkan rasa takut bagi orang lain untuk melakukan pelanggaran tersebut. Pembiasaan, keteladanan dan hukuman tersebut merupakan metode dan pendekatan yang amat ditekankan di dalam al-Qur'an, terutama dalam menanamkan kebiasaan perbuatan yang baik, dan menjauhi perbuatan yang buruk. Fakta sejarah menunjukkan bahwa bangsa-bangsa di

dunia yang terhindar dari korupsi adalah karena bangsa tersebut membiasakan hidup jujur, memberikan keteladanan tentang kejujuran, dan sekaligus memberikan hukuman yang tegas kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran. Nabi Muhammad SAW misalnya dengan tegas mengatakan: "Andaikata Fatimah mencuri, niscaya akan aku potong tangannya." Indonesia yang dikategorikan sebagai negara terkorup di dunia antara lain belum melakukan gerakan hidup jujur, memberikan keteladanan tentang kejujuran, dan sekaligus mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran korupsi. Diketahui bahwa saat ini, Pemerintah Indonesia sudah menunjukkan kemauan, tekad dan keberaniannya yang lumayan untuk memberantas korupsi.

Berbagai perangkat, system, pelaksana dan berbagai perangkat lainnya sudah diciptakan untuk memberantas korupsi tersebut. Pihak Polisi, kejaksaan dan para penegak hukum lainnya sudah menunjukkan kerja kerasnya. Upaya ini sudah mulai membuahkan hasil walaupun terasa masih terdapat kekurangan di sana-sini, termasuk di dalam penciptaan kesejahteraan masyarakat agar mereka tidak tergoda untuk mencuri atau korupsi. Berbagai pejabat yang melakukan korupsi sudah banyak yang diadili dan dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu saat ini, setiap orang sudah terlihat hati-hati dan berfikir seribu kali untuk melakukan tindakan korupsi atau melakukan pelanggaran lainnya. *Keempat*, Perguruan Tinggi adalah tempat mencetak kader-kader yang akan memimpin masa depan bangsa. Perguruan Tinggi adalah lembaga yang paling memiliki idealisme yang tinggi serta komitmen terhadap penegakkan moral.

Idealisme Perguruan Tinggi ini tercipta sebagai hasil kajian mereka terhadap ilmu pengetahuan serta tanggung jawabnya terhadap masyarakat. Atas dasar idealisme dan komitmen moral inilah, tidak mengherankan jika Perguruan Tinggi senantiasa tampil sebagai *moral force*. Berbagai unjuk rasa, demo dan sebagainya yang menuntut penegakkan moral dan idealisme lainnya biasanya muncul dari kalangan Perguruan Tinggi, terutama dari kalangan mahasiswanya. Banyak faktor yang menyebabkan mahasiswa tampil sebagai *moral force* tersebut. Di antaranya, karena mahasiswa sosok manusia yang tengah mencari identitas diri, penuh dengan cita-cita dan idealisme, belum berada dalam struktur yang membelunggunya, mereka masih bebas sehingga dapat

menyuarakan aspirasi dan tindakannya, tanpa harus merasa takut.

Keadaan ini akan terus berlangsung selama ia menjadi mahasiswa. Namun setelah mereka tamat dan bekerja pada birokrasi, biasanya idealisme tersebut mengalami perubahan atau terjadi kelunturan. Hal ini terjadi karena mereka sudah memiliki kecenderungan, kebutuhan terhadap materi, kedudukan dan sebagainya yang menyebabkan idealisme dan komitmen mereka menurun. Untuk itu beberapa langkah dan gerakan yang mengawasi masyarakat agar tetap memiliki komitmen moral sebagaimana tersebut di atas tetap dipertahankan.

Dalam upaya jalan menuju kehidupan berbangsa yang lebih baik, negara kembali menagih peran perguruan tinggi untuk melawan musuh yang lebih berat – yaitu korupsi. Korupsi adalah musuh yang berat, karena disamping seringkali menjadi korban dari perbuatan korupsi ini baik secara langsung maupun tidak, secara sadar atau tidak sadar kita juga bisa menjadi pelaku korupsi, sekalipun seringkali disebut sebagai korupsi kecil-kecilan atau sekedar berperilaku koruptif. Bahwa pada hakikatnya perjuangan melawan korupsi juga berarti perjuangan melawan diri sendiri. Karena korupsi bisa terjadi karena kolaborasi antara niat yang buruk dengan kesempatan yang antara lain dibuka oleh sistem yang lemah.

Dengan demikian, jika kalangan perguruan tinggi ingin menyambut tantangan memberantas korupsi maka harus memberikan perhatian yang serius. Di satu sisi mencegah niat yang buruk untuk korupsi melalui pembangunan budi pekerti dan perilaku yang baik, terutama melalui pendidikan anti korupsi. Dan di saat yang sama terus berupaya memperbaiki sistem dan sub sistem yang ada dalam lingkungan perguruan tinggi, atau sistem di luar perguruan tinggi sebagai sumbangan pemikiran. Sumbangan pemikiran dari kalangan perguruan tinggi selalu mendapat tempat utama karena bersih dari kepentingan dan keberpihakan. Karena itu, gunakan kesempatan ini untuk memberikan yang terbaik agar gerak laju perjalanan bangsa menuju cita-cita bisa kita percepat dalam arah yang benar.

Sebagai kata akhir dari tulisan ini dapat dijelaskan bahwa, nilai-nilai anti korupsi yang perlu dikuatkan dan dikembangkan dalam lingkungan perguruan tinggi meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan,

pertanggungjawaban, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai inilah yang akan mendukung prinsip-prinsip anti korupsi untuk dapat dijalankan dengan baik. Semoga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin. *Strategi Belajar Mengajar*. (Bandung: Jurusan Pendidikan Kimia FPMIPA UPI. 2000).
- Andar Nubowo. *Membangun Gerakan Anti Korupsi dalam Perspektif Pendidikan*, (Yogyakarta: LP3,2004).
- Almond, Gabriel. "Kelompok Kepentingan dan Partai Politik", dalam Mochtar Mas'ood dan Collin Mac.Andrew,*Perbandingan Sistem Politik*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001).
- Ali Gufron Mukti, Dalam Konferensi Internasional Keperawatan di Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, pada tanggal 2 Desember 2015.
- Barnett. *Teaching Reading in a Foreign Language*. (ERIC Digest., 1988).
- De Asis, Maria Gonzales, *Coalition-Building to Fight Corruption*, Paper Prepared for the Anti-Corruption Summit, World Bank Institute, November 2000.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2012. *Pendidikan Anti Korupsi*. (Online), (<http://www.dikti.go.id>), diakses 27 April 2016.
- Gomes, 2000, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cetakan Keempat, (Yogyakarta: ANDI, 2000).
- Hamalik Oemar, *.Perencanaan Pegajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2005).
- Hartanti Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- H.A.R.Tilaar, *.Kekuasaan dan Pendidikan: Kajian Menejemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. (Jakarta: Rinika Cipta.2009).
- , *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia*, (Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya, 1999).
- Kejaksaan Republik Indonesia. 2009. *Tindakan Preventif dan Represif dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. (Online), (<http://www.kejaksaan.go.id>), diakses 26 April 2016.
- Lauer, Robert H, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, Alih Bahasa, Alimandan S.U (*Perpective on Social Change*), (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2001).

- Son Haji, *Perguruan Tinggi Dalam Pembangunan*. (Makalah), (Malang: IKIP, 1990), hlm. 45.
- Sulaeso, *Dasar Perencanaan dan Pemilihan*, Cetakan Kesembilan, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1997).
- Syaful Sagala. *Konsep dan Makna Pembelajaran*. Alfabeta (Bandung: Alfabeta, 2006).
- Miramba Ahmad. *Pengantar filsafat pendidikan Islam* ( Bandung: Al Ma'rif.1989).
- Puspito, N dan Tim Penyusun. *Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. (Jakarta: Kemendikbud.2011).
- R. Subekti dan Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum*. (Jakarta;: Pradnya Paramita.1973).
- Uhar Suharsaputra, *Pendidikan dan Peran Perguruan Tinggi*, <https://uharsputra.wordpress.com> diakses pada tanggal 25 April 2016.
- Wahyudi, I & Sopanah. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Malang Raya*. (Online), (<http://www.ejournal.umm.ac.id>), diakses 27 April 2015.
- Wahyudi, Isa *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*, (Malang: In.Trans Publishing.).
- Yamamah, Ansari. *Perilaku Konsumtif Penyebab Korupsi*. (Jakarta, Gramedia, 2009).
- Zakiah Darajat. *Ilmu Pendidikan Islam*. (Jakarta: Bumi aksara, 2000).  
<http://www.uinjkt.ac.id/id/pendidikan-tinggi-islam-dan-upaya-anti-korupsi>, diakses pada tanggal 25 April 2016